

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kajian Ruang dalam Perkembangan Wilayah

Pendekatan yang di pakai dalam penelitian ini adalah pendekatan keruangan (*Spatial approach*). Yunus (2010:44) pendekatan keruangan didefinisikan sebagai suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang. Pendekatan keruangan dalam geografi merupakan suatu pendekatan dimana mempelajari sifat-sifat penting dari sebuah lokasi. Analisis keruangan ini memperhatikan penyebaran perkembangan wilayah, karena wilayah dengan tingkat perkembangan yang maju akan memiliki daya tarik lebih terhadap penduduk untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan wilayah, seperti yang dijelaskan oleh (Muta'ali, 2013: 20) Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan sarana dan prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Kajian geografi dalam menganalisa ruang sebagai suatu wilayah yang memiliki batasan menurut keadaan fisik, sosial atau pemerintahan yaitu sebagian dari permukaan bumi dan lapisan tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnya (Jayadinata, 2006: 168). Penataan ruang wilayah adalah upaya merumuskan usaha pemanfaatan ruang atau lahan secara optimal dan efisien bagi kegiatan usaha manusia di wilayahnya berupa

pembangunan sektoral, daerah dan swasta masyarakat dalam mewujudkan tingkat kesejahteraan masyarakat (Muta'ali, 2011: 64). Keterkaitan usaha penataan ruang secara struktural dianalisis secara hirarkis dari sudut fungsi pertumbuhan peranan jasa dan pelayanan atas dasar karakter dan besaran dari tiap satuan, sedangkan tingkat pertumbuhan suatu daerah diukur melalui tingkat perkembangan antar daerah dalam hal pertumbuhannya, pada prinsipnya dicapai dengan jalan membuat seimbang satuan-satuan wilayah pembangunan yang dibentuk dan tersebar dalam suatu kesatuan wilayah (Muta'ali, 2011: 66).

2. Tingkat Perkembangan Wilayah

Definisi mengenai wilayah telah didefinisikan oleh para ahli perencanaan wilayah. Glasson (1974) dalam Kasikoen (2005: 31) wilayah merupakan area kontinu yang terletak antara tingkat lokal dan tingkat nasional. Muta'ali (2011:2) menyatakan bahwa pengertian wilayah pada dasarnya bukan sekedar area dengan batas-batas tertentu, menurutnya wilayah adalah suatu area yang memiliki arti (*meaningful*) karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sedemikian rupa, sehingga ahli regional memiliki ketertarikan di dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial-ekonomi. Di Indonesia, pengertian wilayah telah didefinisikan dalam UU No.24 tahun 1992 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait dengan batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional, pengertian tersebut dapat difahami bahwa wilayah tidak

selalu bersifat fisik tetapi lebih menekankan interaksi antar manusia dengan dengan sumber daya yang ada di dalam suatu unit geografis tertentu.

Daldjoeni (1998: 71) berpendapat bahwa perkembangan adalah proses perubahan ke arah yang lebih berkualitas, sikap, pola, pikiran maupun kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik. Perkembangan pada dasarnya merupakan upaya yang terencana dalam upaya mencapai keadaan yang lebih baik. (Matondang, 2018:18) Perkembangan merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan yang juga menjadi perwujudan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Myrdal (1957) dalam Arsyad (1999:129) tentang *spread effect* dan *backwash effect* menyatakan bahwa jika suatu wilayah mengalami perkembangan maka perkembangan itu akan membawa peran atau imbas pada daerah lainnya. Perkembangan wilayah merupakan upaya pembangunan pada suatu wilayah untuk mencapai pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknologi dan prasarana fisik secara efektif (Rahayu & Santoso, 2014:1). Perkembangan wilayah merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan pembangunan yang juga menjadi perwujudan dari pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Matondang, 2018: 19).

Tingkat perkembangan wilayah umumnya terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu karakteristik fisik wilayah (topografi, kesuburan,

aksesibilitas) sumber daya alam, sumber daya manusia serta kebijakan pengelolaan wilayah daerah tersebut. Hirschman & Albert.O dalam Muta'ali (2011: 93) mengemukakan konsep *unbalance growth*, bahwa perkembangan wilayah tidak harus terjadi secara bersamaan secara serentak disegenap pelosok wilayah. Pencapai nilai efisien dan efektif maka prioritas pembangunan harus diberikan pada tempat-tempat yang memiliki potensi, ini dikenal sebagai kutub pertumbuhan (*growing points*). Titik-titik pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan di wilayah lain yang keterjangkauannya relatif kecil (*hinterland*), tetapi pada kenyataannya justru menambah kesenjangan antar wilayah. Wilayah dianggap lebih maju dibanding dengan wilayah lain dapat ditinjau dari berbagai indikator, Hill (1990) dalam Wilonoyudho (2009: 3) menyatakan bahwa perkembangan suatu wilayah dapat dilihat dari indikator yang bersifat statis seperti Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development index*). Tingkat perkembangan regional seperti yang dikemukakan BPS (2011) dalam Muta'ali (2015: 94) dalam penyusunan Indeks Pembangunan Regional (IPR) untuk menggambarkan rating pembangunan daerah memiliki dimensi pengukuran yang lebih lengkap, yaitu:

- a. Ekonomi, meliputi komponen : pendapatan dan urbanisasi (daya beli, pendapatan per kapita), ketenagakerjaan (pekerja formal, fulltime dengan upah diatas UMP), serta kemampuan ekonomi dan investasi (pembentukan modal, kontribusi sektor terhadap PDRB).
- b. Sosial, meliputi komponen: pendidikan (rata-rata lama sekolah, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah, penduduk yang tamat PT),

kesehatan (angka harapan hidup, penduduk tidak sakit, balita imunisasi), kependudukan (pertumbuhan penduduk, rasio ketergantungan, angka kelahiran), dan sosial lainnya (keamanan, penduduk bukan korban kejahatan, penduduk tidak miskin).

- c. Infrastruktur pelayanan publik meliputi: rasio murid di SD, SMP, SMA, rasio dokter terhadap penduduk, penduduk berobat ke RS dan dokter, rasio bank, sawah irigasi dan panjang jalan aspal
- d. Lingkungan hidup: pencemaran udara, pencemaran air/tanah, akses air minum bersih, akses sanitasi layak.
- e. Informasi meliputi: akses internet, penduduk mendengarkan radio, menonton tv, rasio kantorpos, telepon selular.

Pendapat lain mengenai tingkat perkembangan wilayah juga dikemukakan oleh (Mali, Gantar & Kerbler, 2010: 2) beliau berpendapat konsep demografi adalah tolak ukur pada penentuan perkembangan wilayah, wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah yang maju dan berkembang memiliki jumlah penduduk yang relatif stabil dari tahun ke tahun, karena angka migrasi penduduk yang rendah. Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar (Rahayu & Santoso, 2014:1).

3. Hirarki Wilayah dan Pusat Pelayanan

Pendekatan spasial telah diusulkan dalam teori kutub pertumbuhan atau pusat pertumbuhan (Higgins, 1983) dalam pendekatan ini pembangunan daerah

harus dirancang sedemikian sehingga interkoneksi antar pusat pertumbuhan dan daerah pinggiran akan berkembang secara bersamaan, seperti halnya hubungan antar perkotaan dan perdesaan (Putra & Rustiadi, 2015: 2). Hirarki wilayah dan pusat pelayanan pada dasarnya mengacu pada teori pusat pelayanan (*center place theory*) yang disampaikan oleh Cristaller-Losch dalam (Muta'ali 2015:168) beliau berpendapat ada dua konsep pokok yang mendasari teori pusat pelayanan, yaitu:

- a. *The range of good*, yaitu jarak tempuh yang dapat ditolerir oleh suatu barang dan pelayanan tertentu. Jarak dipengaruhi juga oleh jenis, kualitas dan harga barang atau pelayanan yang ditawarkan.
- b. *The threshold value* yaitu jumlah penduduk atau sumberdaya yang dibutuhkan untuk pemenuhan permintaan barang dan pelayanan. *The threshold value* juga ditentukan dari banyaknya jumlah, jenis barang serta pelayanan yang ditawarkan pada wilayah pusat.

Beberapa indikator yang dipakai dalam penentuan daerah pusat pertumbuhan yang dikemukakan oleh (Muta'ali, 2013:107).

- a. Identifikasi potensi sektor atau komoditas unggulan
- b. Ketersediaan sarana-prasarana (pelayanan publik)
- c. Analisis demografi, pertumbuhan, kepadatan penduduk
- d. Kelembagaan masyarakat maupun pemerintah (lembaga ekonomi, sosial dan kemasyarakatan)
- e. Aksestabilitas dan kemudahan ketercapaian lokasi yang terkait dengan sarana dan prasarana.

f. Bebas dari ancaman bencana, baik bencana alam maupun non alam.

Wilayah yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan menjadi pusat daya tarik (*pole of attraction*) yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik untuk berlokasi dan memanfaatkan fasilitas yang ada di wilayah tersebut, sehingga tersebut dapat dikategorikan sebagai pusat pelayanan dan pertumbuhan (Matondang, 2018:29). (Hardati, 2016: 4) berpendapat bahwa tingkat perkembangan wilayah seharusnya diikuti dengan bertambahnya jumlah fasilitas pendukung, dengan kata lain fasilitas pendukung adalah salah satu tolak ukur wilayah tersebut dikatakan sebagai wilayah yang berkembang, hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang ketersediaan fasilitas yang ada di suatu wilayah sehingga dapat ditentukan hirarki wilayah dan pusat pertumbuhan. Kajian pusat pertumbuhan wilayah yang terjadi Kabupaten Lamongan dapat dijadikan sebagai strategi pengembangan wilayah dengan tujuan pemerataan kesejahteraan dengan menentukan wilayah yang menjadi pusat kegiatan sosial dan ekonomi serta pelayanan publik yang dapat mempengaruhi wilayahnya untuk berkembang. Perekonomian merupakan inti dari pemusatan pertumbuhan pada suatu wilayah, seperti halnya perindustrian akan cenderung untuk mengelompok pada lokasi tertentu, keberadaan industri akan mempengaruhi pasar dan hal itu juga akan berpengaruh pada sumber utama pendapatan wilayah (Menghinello, Propriis & Driffield, 2010: 2).

Wilayah-wilayah yang lebih berkembang pada dasarnya mempunyai tingkat interaksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lain yang belum berkembang, interaksi itu sendiri karena adanya aksestabilitas antar

wilayah lain (Matondang, 2018:19). Faktor lain yang mendorong perkembangan wilayah adalah kedekatan lokasi atau suatu wilayah dengan pusat ekonomi dan pemerintahan umumnya akan lebih terdorong untuk berkembang, wilayah dengan lokasi strategis akan berpotensi menjadi penyangga bagi wilayah pusat (Muta'ali, 2015: 194).

4. Identifikasi Tipologi Wilayah Sistem Perkotaan

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe dan jenis. Penentuan tipologi wilayah digunakan untuk menyederhanakan data *time series* dengan membuat penggolongan wilayah yang didasarkan pada kriteria dan indikator tertentu. Pengklasifikasian wilayah perkotaan dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang, tetapi pada dasarnya perkotaan dapat diklasifikasikan dengan menggunakan tiga aspek, aspek fisik, sosial dan ekonomi. (Putra & Rustiadi, 2015: 3) dalam upaya pengklasifikasian wilayah dalam penentuan wilayah unggul harus didasarkan pada keunggulan dan komparatif dan kapasitas dari masing-masing daerah. Salah satu strategi untuk mengurangi ketimpangan pengembangan wilayah adalah dengan mengembangkan wilayah tertentu menjadi pusat pertumbuhan (*growth pole*) secara menyebar (Rahayu & Santoso, 2014:1).

- a. Klasifikasi kota secara fisik merupakan area terbangun dengan intensitas yang tinggi, yang terus menurun menjauhi wilayah pusat kotanya. Hal ini seperti dinyatakan Branch (1995) dalam Kasikoen (2005:32), berpendapat bahwa kota adalah komunitas secara fisik, merupakan area-area terbangun

di perkotaan yang terletak saling berdekatan, yang meluas hingga ke daerah pinggiran kota.

- b. Klasifikasi kota secara sosial dapat dilihat dari aspek demografi (Febriyanti & Ariastita, 2013:2), yaitu jumlah kepadatan penduduk serta ketersediaan fasilitas bagi masyarakat, seperti ketersediaan sarana kesehatan dan sarana pendidikan bagi masyarakat.
- c. Klasifikasi kota secara ekonomi dilihat dari aspek perekonomian masyarakat, seperti penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat. Aspek ekonomi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu banyaknya jumlah industri yang ada, mulai dari industri kecil, sedang dan industri besar.

Penentuan wilayah perkotaan juga di katakan oleh Fiedmann & Miller (1965) dalam Muta'ali (2011:295) konsep wilayah perkotaan (*urban field*). Pengertian *urban field* adalah daerah yang meliputi terutama ruang hidup atau daerah kegiatan penduduk. *Urban field* dapat digambarkan sebagai wilayah yang luas dengan banyak pusat yang mempunyai kepadatan tinggi dan memiliki artikulasi jaringan yang halus dari kaitan ekonomi dan sosial. Banyak negara menggunakan definisi perkotaan yang berbeda-beda (Muta'ali 2011: 295) menyebutkan bahwa pada dasarnya wilayah perkotaan memiliki 3 unsur kriteria yang umum, yaitu: 1.) Ada ambang jumlah penduduk minimum yang bisa dimasukkan ke dalam wilayah perkotaan. 2.) Skala geografis yang cukup luas untuk mendapatkan wilayah perkotaan yang terbangun, dan cukup kecil menjaga nilai minimum kepadatan penduduk. 3.) Daerah dimana pekerja ditarik ke inti perkotaan. *United Nations* (1979: 13) penentuan wilayah kota

harus ada beberapa fasilitas yang tersedia diantaranya adalah fasilitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, olah raga, keagamaan, rekreasi, kebudayaan, administrasi, keamanan, komersial, keuangan, pertanian, peternakan, industri, transportasi, pos, telekomunikasi, perumahan, drainase, listrik serta jalan.

Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No 37 Tahun 2010 tentang adanya kriteria wilayah perkotaan yaitu:

Tabel 2.1 Kriteria wilayah Perkotaan

No	Kriteria	Keterangan
1	Kepadatan Penduduk	$\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Luas Wilayah}}$
2	Fasilitas Pendidikan	Sekolah Taman Kanak-Kanak
		Sekolah Dasar
		Sekolah Menengah Pertama
		Sekolah Menengah Umum
		Perguruan Tinggi
3	Fasilitas Perekonomian	Pasar
		Bioskop
		Pertokoan
		Pasar/Pertokoan/Diskotik/Salon
4	Fasilitas Sosial	Panti
		Rumah Sakit

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017: 4)

B. Kajian Penelitian yang Relevan

No	Nama dan Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Farouq Ghazali Matondang, 2018	Kajian Tingkat Perkembangan Wilayah dan penentuan Pusat Pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara	Menganalisis tingkat perkembangan wilayah di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara	Deskriptif kuantitatif, teknik analisis indeks <i>scalling</i> , sentralisasi, gravitasi, konig shimbel dan analisis AHP dan LQ	Adanya tipologi antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara
2.	Nailul Insani, 2016	Hubungan Tingkat Perkembangan Wilayah dengan Tata Ruang di Kabupaten Bondowoso	Menganalisis tingkat perkembangan wilayah pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Bondowoso, menganalisis struktur dan pola ruang, menganalisis hubungan TPW dengan struktur dan pola ruang untuk menentukan strategi pengembangan wilayah	Kuantitatif, teknik analisis yang digunakan antara lain analisis TPW, skalogram, aksestabilitas, statistik dan analisis SWOT	Adanya kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bondowoso, perbedaan nilai TPW di setiap kecamatan memperlihatkan terjadinya kesenjangan wilayah yang cukup tinggi
3.	E. Stern and Sonis M, 1981	<i>Population Change in a Growth Center Region</i>	Menyajikan skema dari proses pertumbuhan yang	Metode diagram heksagonal	Hasil penelitian yaitu mengklasifikasikan

		<i>With Reference to the Israeli negev</i>	dijelaskan dalam skema yang mengarah pada negara-negara yang stabil-dinamis dan menunjukkan struktur stabil yang mengubungkan antara pusat dan daerah pendukungnya		pertumbuhan penduduk dari pusat pertumbuhan sampai ke daerah pendukungnya
4.	Luthfi Muta'ali dan Sumartini, 2015	Analisis Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Bantul	Menganalisis pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul	Deskriptif kuantitatif	Hasil pertumbuhan ekonomi hanya berpusat pada 4 kecamatan, dari keempat kecamatan tersebut tergolong dalam tingkat perkembangan ekonomi wilayah maju, cepat yang ditunjukkan dari laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita
5.	Wahyudi Iskandar, 2002	Evaluasi Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Analisis Pengaruhnya terhadap Daerah Sekeliling (<i>Hinterland</i>) di Kota Tangerang	Mengidentifikasi kecamatan sebagai pusat pertumbuhan, menentukan batas pengaruh pusat pertumbuhan, menentukan hirarki pelayanan dan melihat sektor basis	Kuantitatif, teknik analisis skalogram, <i>huff, breaking point theory</i> dan LQ	Terdapat dua kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan dengan tiga kecamatan sebagai daerah sekeliling (<i>hinterland</i>)

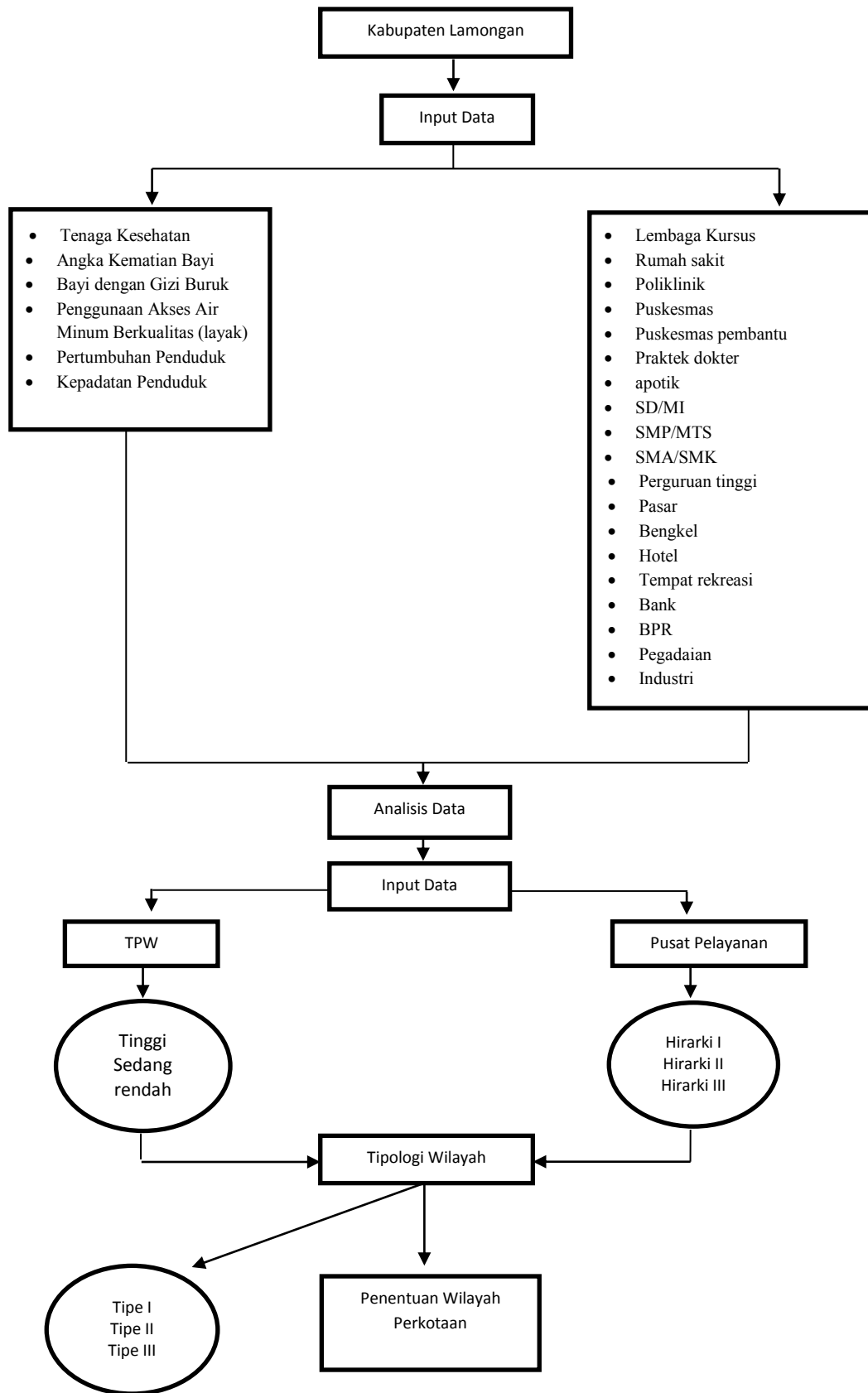
6.	Nikmal Maulana Hasibuan 2007	Penentuan Ibu Kota Kecamatan Sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2004	Mengidentifikasi kecamatan yang dapat dikembangkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi setelah adanya pemekaran daerah, menentukan kecamatan pendukung, mengetahui daya jangkau wilayah kecamatan pusat pertumbuhan, mengetahui komoditas unggulan yang ada pada tiap wilayah kecamatan	Analisis skalogram, analisis gravitasi, analisis jangkauan terdekat, <i>Coefisient Location Quetient</i> (LQ)	Terdapat empat kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan .
7.	Maria Cristina Yuli Pratiwi, 2015	Analisis Pusat Pertumbuhan dan Ketimpangan Regional antar Kabupaten/Kota di Wilayah Kalimantan Tahun 2000 - 2012	Mengetahui kabupaten/kota mana saja yang menjadi pusat pertumbuhan dan tidak meratanya daerah di Pulau Kalimantan	Tipologi kabupaten/kota, LQ, Metode Ratio Pertumbuhan (MRP), Analisis Overlay, Transformasi Struktural, Analisis Faktor, Analisis Cluster dan Analisis Ketimpangan (Indeks	Menunjukkan 4 kota sebagai pusat pertumbuhan di Pulau Kalimantan, konsentrasi perekonomian tersebut dibagian tiur dan barat, sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor unggulan dan kompetitif, transformasi struktural hanya terjadi di Kabupaten Malinau, Hipotesis Kuznets berlaku di Pulau Kalimantan selama periode penelitian cenderung

				Williamson dan Indeks Entropi Theil)	meningkat
8.	Aprinita Dwisna Hapsari dan Belinda Ulfa Aulia, 2018	Tipologi Wilayah Peri Urban Kabupaten Sidoarjo Berdasarkan Aspek Fisik, Sosial dan Ekonomi	Menentukan tipologi wilayah peri urban Kabupaten Sidoarjo berdasarkan aspek fisik, sosial, dan ekonomi sehingga dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan wilayah berdasarkan tipologinya	Analisis overlay dengan tools Weigthed Sum di ArcGIS, dengan menggabungkan hasil tiap skor pada aspek Fisik, Sosial dan Ekonomi	Kabupaten Sidoarjo terdapat 8 Kecamatan Zobikot, 7 Kecamatan Zobikodes, 2 Kecamatan Zobideskot, dan 1 Kecamatan Zobides. Kecamatan yang termasuk klasifikasi Zobikot adalah Kecamatan Taman, Waru, Gedangan, Sukodono, Krian, Sidoarjo, Candi, dan Porong. Kecamatan yang termasuk klasifikasi Zobikodes adalah Kecamatan Buduran, Wonoayu, Balongbendo, Prambon, Tulangan, Tanggulangin, dan Krembung. Kecamatan yang termasuk klasifikasi Zobideskot adalah Kecamatan Sedati dan Tarik. Sedangkan kecamatan yang termasuk klasifikasi Zobides adalah Kecamatan Jabon.

Sumber : Olah Data 2019

C. Kerangka Pikir

Perkembangan wilayah di Kabupaten Lamongan dapat dioptimalkan dengan melihat 3 kunci yaitu *growth* (pertumbuhan), *welfare* (kesejahteraan), dan *equity* (kesamarataan). Perkembangan dalam aspek *growth* yaitu perkembangan yang dapat dilihat dari fisik, sosial dan ekonomi. Perkembangan dalam aspek *welfare* yaitu kesejahteraan masyarakat harus tercapai, serta *equity* yaitu semua masyarakat Kabupaten Lamongan harus merasakan kesejahteraan. Perbedaan sumberdaya serta karakteristik wilayah antara satu wilayah dengan wilayah yang lain akan menentukan tingkat perkembangan wilayah yang berbeda. Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data-data sekunder. Lokasi penelitian adalah Kabupaten Lamongan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder yang berasal dari BPS Kabupaten Lamongan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Analisis perkembangan wilayah dalam penelitian ini yaitu melihat perubahan penggunaan lahan, analisis tingkat perkembangan wilayah untuk menentukan perkembangan wilayah antar kecamatan dengan mengategorikan kedalam tiga kelas, Tinggi, Sedang dan Rendah. Analisis hirarki wilayah pusat pertumbuhan untuk penentuan wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dengan menggolongkan Hirarki I (Tinggi), II (Sedang) dan III (rendah), dari hasil penggabungan analisis TPW dan Hirarki wilayah tersebut dapat dilihat tipologi wilayah yang terjadi yang dapat digunakan sebagai penentu wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan.



D. Hipotesis Penelitian

1. Terjadinya perbedaan tingkat perkembangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Lamongan dibuktikan dengan menggunakan data tahun 2016, 2017 dan 2018
2. Terjadinya pemusatan pelayanan wilayah di Kabupaten Lamongan di buktikan dengan banyak terpusatnya fasilitas sosial dan ekonomi wilayah di beberapa kecamatan di Kabupaten Lamongan
3. Tipologi untuk menentukan wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan yaitu terjadi pada wilayah yang memiliki tingkat perkembangan wilayah yang tinggi dan wilayah yang menjadi pusat pelayanan wilayah di Kabupaten Lamongan